



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **WIWIK SETIYOWATI**
2. Jabatan : **KEPALA**
3. NHK : **205834**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.777.652.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/150 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 55 m2/110 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah Seluas 2218 m2 di KAB / KOTA SITUBONDO, WARISAN Rp. 226.236.000
4. Tanah Seluas 2116 m2 di KAB / KOTA SITUBONDO, WARISAN Rp. 80.408.000
5. Tanah Seluas 816 m2 di KAB / KOTA SITUBONDO, WARISAN Rp. 192.576.000
6. Tanah Seluas 4542 m2 di KAB / KOTA SITUBONDO, WARISAN Rp. 172.596.000
7. Tanah Seluas 2018 m2 di KAB / KOTA SITUBONDO, WARISAN Rp. 205.836.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 74.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000



4. MOBIL, TOYOTA CALYA 1.2 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.  
70.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	118.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	18.484.782
F. HARTA LAINNYA	Rp.	50.000.000
Sub Total	Rp.	2.038.136.782
III. HUTANG	Rp.	305.024.243
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.733.112.539

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.